



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3384-3395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pemerintah Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Juru Parkir Liar di Kota Ngawi

Sangrila Puspita Dewi

Universitas Soerjo

Email: sangrilapuspita92@gmail.com

Abstrak

Keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk ditangani mengingat dampak negatifnya terhadap ketertiban umum dan kualitas hidup pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri peran Pemerintah mengatasi keluhan masyarakat terkait adanya parkir liar di Kota Ngawi. Metode penelitian: Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, anggota kepolisian, komunitas masyarakat, dan juru parkir liar. Sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, selain itu penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait adanya parkir liar di Kota Ngawi, karena ketika masyarakat berkunjung atau berbelanja di tempat/outlet/toko merasa tidak nyaman dengan pungutan juru parkir liar karena juru parkir ini terkadang muncul secara tiba-tiba, tidak membantu atau langsung pergi ketika sudah dibayar, dicemooh dan menghadapi sikap arogan tukang parkir liar ketika masyarakat menolak memberikan uang yang diminta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan memainkan peran penting dalam dinamika praktik parkir liar di Kota Ngawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah dianggap sangat penting dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Ngawi dengan diperlukan langkah-langkah konkret seperti regulasi yang lebih kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan inovasi dalam pengelolaan parkir untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Keluhan, Parkir, Peran Pemerintah*

Abstract

Public complaints regarding illegal parking attendants in Ngawi City are becoming an increasingly urgent problem to be addressed considering the negative impact on public order and the quality of life of road users. This research aims to find out and explore the role of the Government in dealing with community complaints regarding illegal parking in Ngawi City. Research method: Qualitative research methods were used with data collection techniques through in-depth interviews and participatory observation of relevant stakeholders, such as government officials, members of the police, community members and illegal parking attendants. The data sources for this research mostly use primary data obtained through in-depth interviews and observations, apart from that, this research is also supported by secondary data obtained through documentation and literature study. The results of this research show that the government's role is in overcoming public complaints regarding illegal parking in Ngawi City, because when people visit or shop at places/outlets/shops they feel uncomfortable with charges for illegal parking because these parking attendants sometimes appear suddenly, not helping or leaving immediately when they have been paid, being ridiculed and facing the arrogant attitude of illegal parking drivers when people refuse to give the money requested. Research findings show that social, economic and policy factors play an important role in the dynamics of illegal parking practices in Ngawi City. So it can be concluded that the government's role is considered very important in overcoming the problem of illegal parking in Ngawi City with the need for concrete steps such as stronger regulations, active community participation, and innovation in parking management to create a safer, orderly and comfortable urban environment. for all parties.

Keywords: *Complaints, Parking, Role of Government*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan perkotaan di Indonesia, masalah seputar keberadaan juru parkir liar merupakan hal yang tidak asing lagi. Kota-kota besar maupun kecil seringkali dihadapkan dengan keluhan masyarakat terkait perilaku para juru parkir liar yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan (Maria Gasela, 2018). Salah satu kota yang juga mengalami permasalahan serupa adalah Kota Ngawi.

Kota Ngawi memiliki sejumlah infrastruktur mulai dari jalan lingkar luar, tol, gedung perkantoran, dan hotel maupun ruang terbuka hijau yang dibangun di kawasan perkotaan. Adapula taman terbuka hijau yang dibuat di kawasan perkotaan agar dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga lokal maupun warga luar kota. Pembangunan gedung-gedung bertingkat mulai bertebaran di wilayah ini salah satunya adalah pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan tempat makan (Astuti et al., 2023; Judijanto, Asfahani, Bakri, et al., 2022). Demi kenyamanan masyarakat, tempat-tempat tersebut harus bersahabat dan memiliki

fasilitas parkir yang memadai, aman dan terbebas dari juru parkir ilegal. Terganggunya masyarakat mengenai juru parkir liar membuat para masyarakat enggan untuk mengunjungi infrastruktur yang ada di Ngawi terutama tempat/toko/outlet yang ada juru parkir liarnya ini juga menyebabkan para pengusaha merasakan ketakutan terhadap nilai beli masyarakat. Pemerintah juga tidak bisa tutup mata dengan mereka yang nekat menjadi juru parkir liar demi mencari sesuap nasi (Haslinah et al., 2023; Rahayu et al., 2024; Triningtyas & Muhayati, 2018). Mereka yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan formal atau informal yang layak, terlebih lagi pasca kondisi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks ini, para juru parkir liar ini tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kota Ngawi, meskipun tergolong sebagai kota kecil, tetap tidak luput dari masalah tersebut. Praktik penarikan tarif parkir secara sembarangan oleh juru parkir liar, bersama dengan perilaku tidak menyenangkan lainnya seperti intimidasi terhadap pengguna jalan, seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kota ini (Ganda et al., 2020; Roos, 2021). Hal ini menjadi titik fokus utama dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi.

Keberadaan juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut karena adanya potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi tata kota dan kualitas hidup masyarakat (Lewaherilla et al., 2022). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas perkotaan, permasalahan terkait parkir semakin mendesak untuk ditangani secara efektif. Namun, hingga saat ini, belum terdapat upaya yang memadai dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini dengan tuntas (Asfahani et al., 2023; S. P. Dewi et al., 2022; Rohman et al., 2023).

Gap atau kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur terkait adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi untuk mengatasi masalah juru parkir liar secara menyeluruh. Sementara itu, kebutuhan akan inovasi dalam pendekatan penanganan permasalahan parkir juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan konteks khusus Kota Ngawi, terdapat celah yang perlu diisi dalam upaya pemecahan masalah ini (Agustin & Tarigan, 2022; Aini & Adianto, 2023; I. nurani Dewi et al., 2020; Murti et al., 2021; Purwaningsih, 2022; Suharyadi et al., 2015). Hingga saat ini, literatur yang mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi masih terbatas, dan belum terdapat kajian yang secara khusus membahas solusi yang berkelanjutan dan inovatif untuk permasalahan ini di tingkat lokal.

Novelty dari artikel ini terletak pada eksplorasi solusi dan strategi baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi guna mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap masalah parkir di lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Ngawi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap peran pemerintah dalam mengatasi masalah parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi praktik parkir liar di Kota Ngawi. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang menggali lebih dalam mengenai solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan parkir di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks perkembangan perkotaan di Indonesia, masalah seputar keberadaan juru parkir liar merupakan hal yang tidak asing lagi. Kota-kota besar maupun kecil seringkali dihadapkan dengan keluhan masyarakat terkait perilaku para juru parkir liar yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan (Maria Gasela, 2018). Salah satu kota yang juga mengalami permasalahan serupa adalah Kota Ngawi.

Kota Ngawi memiliki sejumlah infrastruktur mulai dari jalan lingkar luar, tol, gedung perkantoran, dan hotel maupun ruang terbuka hijau yang dibangun di kawasan perkotaan. Adapula taman terbuka hijau yang dibuat di kawasan perkotaan agar dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga lokal maupun warga luar kota. Pembangunan gedung-gedung bertingkat mulai bertebaran di wilayah ini salah satunya adalah pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan tempat makan (Astuti et al., 2023; Judijanto, Asfahani, Bakri, et al., 2022). Demi kenyamanan masyarakat, tempat-tempat tersebut harus bersahabat dan memiliki fasilitas parkir yang memadai, aman dan terbebas dari juru parkir ilegal. Terganggunya masyarakat mengenai juru parkir liar membuat para masyarakat enggan untuk mengunjungi infrastuktur yang ada di Ngawi terutama tempat/toko/outlet yang ada juru parkir liarnya ini juga menyebabkan para pengusaha merasakan ketakutan terhadap niai beli masyarakat. Pemerintah juga tidak bisa tutup mata dengan mereka yang nekat menjadi juru parkir liar demi mencari sesuap nasi (Haslinah et al., 2023; Rahayu et al., 2024; Triningtyas & Muhayati, 2018). Mereka yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan formal atau informal yang layak, terlebih lagi pasca kondisi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks ini, para juru parkir liar ini tidak bisa hanya dilihat sebagai

pelanggar hukum, tetapi juga sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kota Ngawi, meskipun tergolong sebagai kota kecil, tetap tidak luput dari masalah tersebut. Praktik penarikan tarif parkir secara sembarangan oleh juru parkir liar, bersama dengan perilaku tidak menyenangkan lainnya seperti intimidasi terhadap pengguna jalan, seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kota ini (Ganda et al., 2020; Roos, 2021). Hal ini menjadi titik fokus utama dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi.

Keberadaan juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut karena adanya potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi tata kota dan kualitas hidup masyarakat (Lewaherilla et al., 2022). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas perkotaan, permasalahan terkait parkir semakin mendesak untuk ditangani secara efektif. Namun, hingga saat ini, belum terdapat upaya yang memadai dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini dengan tuntas (Asfahani et al., 2023; S. P. Dewi et al., 2022; Rohman et al., 2023).

Gap atau kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur terkait adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi untuk mengatasi masalah juru parkir liar secara menyeluruh. Sementara itu, kebutuhan akan inovasi dalam pendekatan penanganan permasalahan parkir juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan konteks khusus Kota Ngawi, terdapat celah yang perlu diisi dalam upaya pemecahan masalah ini (Agustin & Tarigan, 2022; Aini & Adianto, 2023; I. nurani Dewi et al., 2020; Murti et al., 2021; Purwaningsih, 2022; Suharyadi et al., 2015). Hingga saat ini, literatur yang mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi masih terbatas, dan belum terdapat kajian yang secara khusus membahas solusi yang berkelanjutan dan inovatif untuk permasalahan ini di tingkat lokal.

Novelty dari artikel ini terletak pada eksplorasi solusi dan strategi baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi guna mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap masalah parkir di lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Ngawi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap peran pemerintah dalam mengatasi masalah parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi praktik parkir liar di Kota Ngawi. Dengan demikian, tulisan

ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang menggali lebih dalam mengenai solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan parkir di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa temuan yang relevan terkait peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi. Melalui metode kualitatif, ditemukan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan parkir di kota ini. Salah satu temuan utama adalah bahwa keberadaan juru parkir liar dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Pertama, dari segi faktor sosial, ditemukan bahwa sebagian besar juru parkir liar adalah orang-orang dari latar belakang ekonomi rendah yang mencari mata pencaharian tambahan. Mereka seringkali berasal dari lingkungan sekitar dan menemukan peluang dalam praktik parkir liar untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya terkait dengan tata kota, tetapi juga merupakan cermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Ngawi.

Kedua, dari segi faktor ekonomi, ditemukan bahwa tarif parkir yang diberlakukan oleh juru parkir liar cenderung tidak teratur dan seringkali berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya hidup masyarakat pengguna jasa parkir, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, praktik intimidasi dan tekanan dari juru parkir liar juga menjadi masalah serius yang memengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Ketiga, dari segi kebijakan pemerintah, ditemukan bahwa belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar di Kota Ngawi. Meskipun ada upaya-upaya sporadis seperti razia dan penertiban, namun belum ada langkah-langkah yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah konkret dan strategis dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan parkir liar ini.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi. Diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kualitas hidup dan tata kota di Kota Ngawi.

Tabel 1. Temuan Faktor yang mempengaruhi Parkir Liar

No	Faktor	Temuan
1	Faktor Sosial	Mayoritas juru parkir liar dari latar belakang ekonomi rendah yang mencari mata pencaharian tambahan. Mereka sering berasal dari lingkungan sekitar.
2	Faktor Ekonomi	Tarif parkir liar tidak teratur, seringkali berlebihan, memengaruhi biaya hidup masyarakat. Praktik intimidasi dari juru parkir liar juga sering terjadi.
3	Kebijakan	Belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar. Upaya-upaya penertiban masih bersifat sporadis tanpa langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan.

Tabel ini merangkum temuan-temuan utama dari penelitian yang mengungkap faktor-faktor terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah juru parkir liar di Kota Ngawi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan parkir di kota tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi memiliki beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan secara holistik. Dalam konteks faktor sosial, temuan bahwa mayoritas juru parkir liar berasal dari latar belakang ekonomi rendah memberikan pemahaman mendalam bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan ketertiban umum tetapi juga menjadi refleksi dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Andriati & Wahjudi, 2016; Arabi, 2022; Kusumawati & Sadik, 2016). Kondisi sosial ini memengaruhi dinamika praktik parkir liar dan mendorong perlunya pendekatan pembangunan yang berfokus pada inklusivitas dan kesetaraan akses (Bormasa, 2023; Larisu & Jopang, 2022).

Selanjutnya, faktor ekonomi yang terungkap dari penelitian menyoroti urgensi untuk mengatasi ketidakteraturan tarif parkir dan praktik intimidasi dari juru parkir liar. Kajian teoritik dapat menambahkan perspektif bahwa ketidakpastian dalam tarif parkir dapat menciptakan ketidakadilan akses terhadap fasilitas publik, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Ridwan & Surya, 2018; Setiawan, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik yang menekankan perlunya distribusi yang adil dalam pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya kota (Fatimah, 2021; Hayadi, 2021).

Kemudian, dari segi kebijakan pemerintah, hasil penelitian menyatakan bahwa belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar di Kota

Ngawi. Analisis teoritik menambahkan pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan dalam menanggulangi masalah parkir liar tidak hanya terletak pada ketegasan hukum tetapi juga pada keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian dengan konteks lokal (Herdiana, 2023; Judijanto & Asfahani, 2022; Korain et al., 2019). Diperlukan pendekatan yang adaptif dan terpadu antara kebijakan formal dan mekanisme partisipatif untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Haning, 2018; Judijanto et al., 2022; Măță Liliana et al., 2023).

Dengan demikian, analisis hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Ngawi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan. Integrasi antara temuan penelitian dan kajian teoritik membuka ruang untuk merancang strategi dan kebijakan yang lebih berbasis bukti, berorientasi pada keadilan sosial, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parkir liar dalam konteks perkotaan yang terus berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan kajian teoritik, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terungkap dari penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan permasalahan parkir liar haruslah holistik dan terintegrasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan strategis dari pemerintah yang mengakomodasi kompleksitas permasalahan ini, mulai dari regulasi yang lebih kuat dan efektif, pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian masalah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan eksplorasi mengenai implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi masalah juru parkir liar di Kota Ngawi. Penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kebijakan yang diterapkan, evaluasi tingkat partisipasi masyarakat, serta pengembangan model kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkotaan. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat melibatkan aspek teknologi dalam pengelolaan parkir yang inovatif, seperti penggunaan sistem parkir digital atau aplikasi berbasis teknologi untuk memudahkan pengaturan dan pemantauan parkir di Kota Ngawi. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkrit dalam upaya mengatasi permasalahan parkir liar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Ngawi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas. *VISA Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 216–236.
- Aini, F. H., & Adiarto, A. (2023). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2524–2531.
- Andriati, & Wahjudi, R. M. T. (2016). Tingkat Penerimaan Penggunaan Jamu sebagai Alternatif Penggunaan Obat Modern pada Masyarakat Ekonomi Rendah - Menengah dan Atas. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(3), 133–145. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V29I32016.133-145>
- Arabi, A. (2022). Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis Di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2, 239–248.
- Asfahani, A., El-Farra, S. A., & Iqbal, K. (2023). International Benchmarking of Teacher Training Programs: Lessons Learned from Diverse Education Systems. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(2), 141–152.
- Astuti, S. W., Puspitasari, A., Dewi, P., & Fitria, N. (2023). Pengenalan Rambu Dan Semboyan Kereta Api Pada Siswa SDN Tambakrama I Kabupaten Ngawi. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 757–762.
- Bormasa, M. F. (2023). Menjembatani Jurang Sosial: Kegiatan dalam Meningkatkan Akses dan Kesenjangan dalam Konservasi Lingkungan di Daerah Terisolasi (Studi di Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 468–476.
- Dewi, I. nurani, Royani, I., Sumarjan, S., & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Dewi, S. P., Alsakinah, R., Sara, S. A., & Amrina, D. H. (2022). Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Dari Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 2(1), 7–13.
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatoma Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Ganda, C. F., Moetriono, H., & Mudjanarko, S. W. (2020). Analisis Alternatif Pembiayaan

- Penyeberangan Asdp Ujung-Kamal Akibat Dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). *Astonjadro*, 8(2), 103. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v8i2.2801>
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
- Haslinah, A., Tahir, U., Al Imran, H., Asfahani, A., & Larisu, Z. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM LINGKUNGAN HIJAU BEBAS POLUSI DI KOTA MAKASSAR. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8906–8912.
- Hayadi, F. I. (2021). Analisis kebijakan akuntansi koleksi bahan pustaka sebagai barang milik negara di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 97–115.
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 102–116.
- Judijanto, L., & Asfahani, A. (2022). 21st Century Economic Transformation: The Impact of Artificial Intelligence on Markets and Employment. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 1(1), 41–48.
- Judijanto, L., Asfahani, A., Bakri, A. A., Susanto, E., & Kulsum, U. (2022). AI-Supported Management through Leveraging Artificial Intelligence for Effective Decision Making. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 1(1), 59–68.
- Judijanto, L., Asfahani, A., & Krisnawati, N. (2022). The Future of Leadership: Integrating AI Technology in Management Practices. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 1(2), 99–106.
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, 1(086), 94–109.
- Kusumawati, F., & Sadik, J. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pengolah sabut kelapa melalui inkubator bisnis dan Teknologi Tepat Guna. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 10(2), 186–210.
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten

- Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341.
- Maria Gasela, N. (2018). *Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif pada Peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009)*.
- Măţă Liliانا, Asfahani Asfahani, & Mariana Mariana. (2023). Comparative Analysis of Educational Policies: A Cross-Country Study on Access and Equity in Primary Education. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(1), 19–28.
- Murti, H. T., Puspita, V., & Ratih, P. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan Organisasi dalam Mendukung Bisnis Berkelanjutan Pasca Covid-19 pada UMKM di Kota Bengkulu. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital*, 1(1), 33–41.
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Rahayu, I., Suwarna, A. I., Wahyudi, E., Asfahani, A., & Jamin, F. S. (2024). Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Membentuk Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar. *Global Education Journal*, 2(2), 101–110.
- Ridwan, R., & Surya, C. (2018). Pemberdayaan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa citengah kabupaten sumedang. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 28–33.
- Rohman, A., Asfahani, A., & Iqbal, K. (2023). Comprehensive Analysis of AI's Contribution to Global Economic Development. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 2(2), 33–39.
- Roos, D. O. (2021). David. O. Roos, Sampah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Ahuru Air Besar Kota Ambon. *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 57–69.
- Setiawan, S. A. (2019). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Suharyadi, E., Cangara, H., Salle, A., Hasanuddin, U., Hukum, I., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2015). Hambatan Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare Di Kabupaten Pangkep. *Komunikasi*

KAREBA, 4(2), 161–171.

Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2018). Konseling Lansia: Upaya Lanjut Usia dalam Membangun Kemandirian Hidup dan Penerimaan Diri Terhadap Kesiapan Memasuki Masa Pensiun (Studi Pada Lansia di Bina Keluarga Lansia Posyandu Cempaka Kabupaten Ngawi). *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 4(1), 16–21.